



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**RENJA**  
**2024**

JL. Wolter Monginsidi Komplek  
Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara  
Gedung E Lantai 1 Telp. 0541-661832,  
Fax. 6669032 Kode Pos. 75511

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2024 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-3 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021 - 2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun

berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan program/kegiatan yang direncanakan, dan semoga Program/Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan nanti mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Tenggarong, Maret 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3.1 Maksud</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3.2 Tujuan</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2022</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD</b> .....	<b>8</b>
<b>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....	<b>27</b>
<b>2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD</b> .....	<b>29</b>
<b>1. Tingkat Pelayanan DINAS PMD</b> .....	<b>29</b>
<b>2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b> .....	<b>33</b>
<b>3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah</b> .....	<b>35</b>
<b>4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara</b> .....	<b>37</b>
<b>5. Formulasi isu-isu penting :</b> .....	<b>38</b>
<b>2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2024</b> .....	<b>40</b>
<b>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</b> .....	<b>60</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>64</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>64</b>
<b>3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</b> .....	<b>64</b>
<b>3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah</b> .....	<b>73</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>77</b>
<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>77</b>
<b>4.1 Rencana Program Kerja dan Kegiatan</b> .....	<b>77</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>97</b>
<b>P E N U T U P</b> .....	<b>97</b>
<b>a. Catatan Penting</b> .....	<b>97</b>
<b>b. Kaidah pelaksanaan</b> .....	<b>98</b>

**c. Tindak Lanjut.....99**

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, maka setiap pembangunan seyogyanya harus diselenggarakan melalui sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Dan perencanaan tersebut harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk menjalankan amanat undang - undang tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun melalui mekanisme penyerapan aspirasi, mengakomodasi kepentingan nasional serta kebutuhan daerah itu sendiri, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan (RPT). Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004). Untuk membantu pelaksanaan tujuan RPJMD tersebut, maka Organisasi Perangkat Daerah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan difokuskan lagi pada Rencana Kerja

Tahunan dengan dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada RPJMD dan RENSTRA OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara (DINAS PMD Kutai Kartanegara) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ;
2. RENJA OPD merupakan acuan atau pedoman bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DINAS PMD Tahun 2024

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
12. Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
14. Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang BPD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 MAKSUD**

Penyusunan RENJA DINAS PMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 (tahun berjalan) dan

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2024.

### **1.3.2 TUJUAN**

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DINAS PMD Kutai Kartanegara Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN : Program dan Kegiatan untuk proyeksi Tahun Anggaran 2024

BAB V PENUTUP : Catatan Penting, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PMD TAHUN 2022****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN****RENSTRA-PD**

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DINAS PMD Tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 yang sudah terinput pada Aplikasi E-Pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%
  - b) Program Penataan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
  - c) Program Peningkatan Kerjasama Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
  - d) Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan secara umum capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan capaian Kinerja Program Sebesar 96,8%. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 96,8%.
2. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan capaian kinerja sebesar 85%, dimana indikator sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat) dengan capaian target indikator sebesar 100%.
  - b. Jumlah Kader Posyandu yang dibina dengan capaian target indikator sebesar 55%.
  - c. Jumlah Ketua RT yang terfasilitasi JKN dan JKK dengan capaian target indikator sebesar 100%.

3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor :

Untuk dapat mewujudkan capaian target kinerja yang maksimal sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja secara signifikan OPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran serta dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan dapat melaksanakan program wajib dari pemerintah baik berupa program melekat maupun program bantuan yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian perlunya peningkatan SDM, dan selanjutnya perlu dilakukan melalui kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan khususnya dalam bentuk pelatihan Penyusunan Program Kerja OPD, sehingga program dan kegiatan bidang dapat terintegrasi diantara semua bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya gedung kantor yang memadai.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

**Tabel T.C-29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2003**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja-PD tahun (2021)	Realisasi Renja-PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)</i>	100	85	100	73,58	95	129	77	272	320
2	13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	300	300

# RENCANA KERJA | 2024

2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	9	9	9	100	9	27	56
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6				#DIV/0!	0	0	-
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>417</b>	<b>12</b>	<b>212</b>	<b>353</b>
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan	13910	2588	1498	1478	99	2782	6848	49
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/SKPD	60	12	15	15	100	12	39	65
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Honor Narasumber			76	76	100			#DIV/0!
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>2.040</b>
2	13	01	2.03	06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	5	1	5	5	100	1	7	140
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-				#DIV/0!		0	#VALUE!
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	222	22	10	10	100	22	54	24
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>84,2</b>	<b>17</b>	<b>84,2</b>	<b>495</b>	<b>17</b>	<b>185,4</b>	<b>185</b>
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	128	4	35	35	100	4	43	34

					Jumlah bahan Logistik Kantor	153		21	21	<b>100</b>			-
					Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu	3621		1424	1424	<b>100</b>			-
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	252000	2	38295	37925	<b>99</b>	2	37929	<b>15</b>
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9276				<b>#DIV/0!</b>	15	15	<b>0</b>
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290	12	290	239	<b>82</b>	50	301	<b>104</b>
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930	1			<b>#DIV/0!</b>	1	2	<b>0</b>
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13	0	8	0	-	0	0	-
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135	33	39	39	<b>100</b>	33	105	<b>78</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>625</b>	<b>17</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000	740	673	673	<b>100</b>	740	2153	<b>43</b>
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120	20	24	24	<b>100</b>	2	46	<b>38</b>
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44	2	3	3	<b>100</b>	2	7	<b>16</b>
					Jumlah sewa mobil dinas pejabat	24	1			<b>#DIV/0!</b>	0		-
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230	12	543	543	<b>100</b>	12	567	<b>247</b>

2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>625</b>	<b>17</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95	5	7	7	<b>100</b>	5	17	<b>18</b>
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				<b>#DIV/0!</b>	0	0	<b>#VALUE!</b>
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	415	33	32	32	<b>100</b>	33	98	<b>24</b>
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	1			<b>#DIV/0!</b>	1	2	<b>200</b>
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1				<b>#DIV/0!</b>		0	-
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa</b>	<b>38,86</b>	<b>100</b>	<b>n.a</b>	<b>100</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>2</b>	<b>202</b>	<b>520</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa</b>	<b>148</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>1.250</b>	<b>33</b>	<b>152</b>	<b>103</b>
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa	19	6	6	6	<b>100</b>	6	18	<b>95</b>
						Jumlah dokumen			1	1	<b>100</b>			
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10				<b>#DIV/0!</b>	0	0	-
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangan	50	10			<b>#DIV/0!</b>	10	20	<b>40</b>

# RENCANA KERJA | 2024

						Jumlah Hasil Kajian	1	1			#DIV/0!	1		-
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21	6			#DIV/0!	6	12	57
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana Prasarananya	50	10	3	3	100	10	23	46
						Jumlah Data Sarana Prasarana Desa	4				#DIV/0!			-
						Jumlah aplikasi Sarana Prasarana Desa	1				#DIV/0!			-
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>n.a</b>	<b>100</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi</b>	<b>288</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>769</b>	<b>30</b>	<b>194</b>	<b>67</b>
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Data potensi desa yang akan bekerjasama	5	1			#DIV/0!	1	2	40
						Jumlah desa yang difasilitasi untuk bekerjasama	50	6	4	4	100	6		-
						Jumlah Desa yang disosialisasikan tentang regulasi kerjasama desa	193				#DIV/0!			-
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	20	2			#DIV/0!	2	4	20
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi	10	2	5	5	100	2	9	90
						Jumlah Data potensi per desa dan potensi unggulan desa	10				#DIV/0!			-
						Jumlah Desa Yang Difasilitasi			34	34	100			
						Jumlah Kawasan yang didampingi	6				#DIV/0!			-
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>84</b>	<b>525</b>	<b>50</b>	<b>234</b>	<b>246</b>
						<b>Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</b>	<b>50</b>				#DIV/0!	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</b>	<b>15565</b>	<b>100</b>		<b>84</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>193</b>	<b>377</b>	<b>2</b>
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan/Kasus yang difasilitasi	40	7	5	5	<b>100</b>	7	19	<b>48</b>
						Jumlah Desa Dimonev			30	31	<b>103</b>			
						Jumlah Desa Mengikuti Optimalisasi			50	52	<b>104</b>			
						Jumlah Tim Verifikasi yang Difasilitasi			16	16	<b>100</b>			
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	30	13	1	1	<b>100</b>	10	24	<b>80</b>
						Jumlah Dokumen			7	11	<b>157</b>			
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	140	28	28	28	<b>100</b>	28	84	<b>60</b>
						Jumlah Desa yang didampingi (penguatan RPJMDes)			25	25	<b>100</b>			
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan	150	23			<b>#DIV/0!</b>	22	45	<b>30</b>
						Jumlah Desa yang dimonev	125	22			<b>#DIV/0!</b>	22		-
						Jumlah Kecamatan yang mengikuti pembekalan	80				<b>#DIV/0!</b>			-
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial	8750	15589	41750	21155	<b>51</b>	21950	58694	<b>671</b>
						Jumlah Kepala Desa Yang dilatih	193	86			<b>#DIV/0!</b>	86		-
						Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas pemerintahan desa	1185	193			<b>#DIV/0!</b>	193		-
						Jumlah Anggota BPD yang dipilih dan dilantik			420	420	<b>100</b>			

# RENCANA KERJA | 2024

2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	75	15			<b>#DIV/0!</b>	15	30	<b>40</b>
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan Unit Usaha BUM Desa (Kelistrikan dan Air Bersih Desa) yang difasilitasi	193	2	15	15	<b>100</b>	2	19	<b>10</b>
						Jumlah yang mengikuti Pelatihan Manajemen BUMDesa	579		100	100	<b>100</b>			-
						Jumlah Regulasi Pembentukan BUMDes/ BUMDesma yang mengelola Pertanian	5				<b>#DIV/0!</b>			-
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi Penerima Hibah	8	4			<b>#DIV/0!</b>	4	8	<b>100</b>
						Jumlah Kepala Desa Yang terpilih	193	86			<b>#DIV/0!</b>	86	172	<b>89</b>
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	270	13	25	25	<b>100</b>	13	51	<b>19</b>
						Jumlah dokumen yang disusun			1	1	<b>100</b>			
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Yang Disusun	5	1	1	1	<b>100</b>	1	3	<b>60</b>
						Jumlah Desa yang difasilitasi	5				<b>#DIV/0!</b>			-
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah data pemutakhiran SDGS			1	1	<b>100</b>			<b>#DIV/0!</b>
						Jumlah pembentukan klinik desa			1	0	-			<b>#DIV/0!</b>
						Jumlah pendamping desa P3MD yang difasilitasi(rakor)			3	3	<b>100</b>			<b>#DIV/0!</b>
						Jumlah penyusunan verifikasi APBDes			1	0	-			<b>#DIV/0!</b>
						Jumlah tenaga pendamping profesional yang difasilitasi			88	88	<b>100</b>			<b>#DIV/0!</b>
						Jumlah tenaga pendamping profesional yang dilatih			278	0	-			<b>#DIV/0!</b>
				Jumlah tenaga pendamping profesional yang direkrut			278	0	-				<b>#DIV/0!</b>	

					Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Pelatihan	48	6			#DIV/O!	6	12	<b>25</b>	
					Jumlah Tim Gugus Tugas Pendamping Desa yang di Fasilitasi	6				#DIV/O!			-	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	125	15		#DIV/O!	15	30	<b>24</b>	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik	640	220		#DIV/O!	220	440	<b>69</b>	
						Jumlah Anggota BPD yang Dibina dan dilatih	640	220		#DIV/O!	220		-	
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi	75	11		#DIV/O!	11	22	<b>29</b>	
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang difasilitasi	100	20		#DIV/O!	20	40	<b>40</b>	
2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen yang disusun	3	1		#DIV/O!	1	2	<b>67</b>	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangannya dan jumlah dokumen IDM yang disusun	10	2	1	1	<b>100</b>	2	5	<b>50</b>
						Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba	193	2			#DIV/O!	15		-
						Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Aplikasi EPDESKEK (Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan)	1075		40	40	<b>100</b>			-
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</b>	<b>100</b>	<b>96,8</b>	<b>100</b>	<b>86,3</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>283,1</b>	<b>#VALUE!</b>
					<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	<b>70,35</b>		<b>39</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	

2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</b>	<b>3826</b>	<b>86,3</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>210</b>	<b>296,3</b>	<b>8</b>	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5	1			<b>#DIV/0!</b>	1	2	<b>40</b>	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan Desa yang difasilitasi	300	2			<b>#DIV/0!</b>	2	4	<b>1</b>	
						Jumlah Posyandu Terintegrasi yang dibentuk dan dibina	18				<b>#DIV/0!</b>			-	
						Jumlah Pemutahiran data Lembaga Posyandu di Desa/Kel	5				<b>#DIV/0!</b>			-	
						Jumlah desa yang didampingi			30	30	<b>100</b>				
						Jumlah Pokjnal Posyandu yang dibina			18	18	<b>100</b>				
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat)	1030	30	85	85	<b>100</b>	30	145	<b>14</b>	
						Jumlah Kader Posyandu yang dibina	1560	95	60	60	<b>100</b>	175	330	<b>21</b>	
						Jumlah Program Kelompok Binaan PKK yg difasilitasi			10	10	<b>100</b>				
						Jumlah Ketua RT yang terfasilitasi JKN dan JKK			37824	37548	9324	<b>25</b>	38748	85896	<b>#DIV/0!</b>

2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Sarana dan Prasarananya	300	44	44	44	<b>100</b>	44	132	<b>44</b>	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi	118	15	16	15	<b>94</b>	15	45	<b>38</b>	
						Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pedesaan	200	25	40	40	<b>100</b>	25	90	<b>45</b>	
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi			40	40	<b>100</b>				
						Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan	250	25	50	50	<b>100</b>	25	100	<b>40</b>	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	3	2	3	1	<b>33</b>	3	6	<b>#VALUE!</b>	
						Jumlah Teknologi Tempat Guna yang dikembangkan	10	2			<b>#DIV/0!</b>	2		-	
						Jumlah desa yang difasilitasi			50	50	<b>100</b>				
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Gelar Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	3			<b>#DIV/0!</b>	3	6	<b>40</b>	
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah peserta yang dilatih	50	20			<b>#DIV/0!</b>	20	40	<b>80</b>	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan PKK Kabupaten yang difasilitasi	25	3	16	11	<b>69</b>	3	17	<b>68</b>	

Dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat signifikansi, capaian dan kesesuaian realisasi antara capaian kinerja Program, Kegiatan dengan Sub Kegiatan maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL KESESUAIAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		KETERANGAN
				Kinerja	%		Anggaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)</b>	<b>77</b>	<b>87,7</b>	<b>113,9</b>	<b>16.029.175.006</b>	<b>12.997.654.648</b>	<b>81,09</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96.832.000</b>	<b>89.460.000</b>	<b>92,39</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	100	96.832.000	89.460.000	92,39	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Akuntabel</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>13.292.053.198</b>	<b>10.456.109.234</b>	<b>78,66</b>	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yang Mendapat Gaji Dan Tunjangan	2.782	2.588	93,03	13.073.259.430	10.252.820.434	78,43	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SKPD	12	12	100	218.793.768	203.288.800	92,91	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>40.800.000</b>	<b>40.800.000</b>	<b>100</b>	
4	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	100	40.800.000	40.800.000	100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>83.510.881</b>	<b>33.135.860</b>	<b>39,68</b>	

5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	22	22	100	83.510.881	33.135.860	39,68	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>602.101.699</b>	<b>591.396.264</b>	<b>98,22</b>	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor	4	4	100	225.682.699	225.592.077	99,96	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Di Sediakan	2	2	100	55.400.000	47.713.600	86,13	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Jasa Bahan Bacaan ( Koran , Pemasangan Iklan dan Lainnya)	0	0	0				
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	12	24	250.511.000	247.729.577	98,89	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah teknologi informasi yang terlaksana/terlayani	8	0	0		-	0	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100	70.508.000	70.361.010	99,79	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>283.088.600</b>	<b>280.354.310</b>	<b>99,03</b>	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	33	33	100	283.088.600	280.354.310	99,03	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>1.176.148.628</b>	<b>1.145.656.831</b>	<b>97,41</b>	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	740	740	100	7.403.000	7.400.000	99,96	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100	183.720.000	178.100.000	96,94	
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	100	89.124.900	68.415.023	76,76	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	895.900.728	891.741.808	99,54	

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>454.640.000</b>	<b>360.742.149</b>	<b>79,35</b>	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	5	5	100	102.760.000	81.550.294	79,36	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan Lainnya yang Dipelihara	33	33	100	43.940.000	43.322.420	98,59	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	307.940.000	235.869.435	76,6	
	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Prosentase Desa yang Memiliki Tata Ruang Desa</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>429.900.000</b>	<b>265.576.400</b>	<b>61,78</b>	
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>57,58</b>	<b>429.900.000</b>	<b>265.576.400</b>	<b>61,78</b>	
20	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitas Pembentukan Desa	6	6	100	100.000.000	69.210.600	69,21	
21	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Kewenangan	10	10	100	79.900.000	52.987.800	66,32	
		Jumlah Hasil Kajian	1	1	100				
22	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penamaan dan Kode Desa	6	6	100	50.000.000	16.608.000	33,22	
23	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana Prasarananya	10	10	100	200.000.000	126.770.000	63,39	
	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>350.000.000</b>	<b>256.234.000</b>	<b>73,21</b>	
	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>213,33</b>	<b>350.000.000</b>	<b>256.234.000</b>	<b>73,21</b>	
24	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Data Potensi Desa yang akan Bekerjasama	1	1	100	100.000.000	62.997.000	63	
		Jumlah Desa yang Difasilitasi Untuk Bekerjasama	6	6	100				
25	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi	2	2	100	100.000.000	43.237.000	43,24	

26	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi	2	2	100	150.000.000	150.000.000	100	
	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>13.600.746.881</b>	<b>11.551.469.846</b>	<b>84,93</b>	
		<b>Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>				
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>13.600.746.881</b>	<b>11.551.469.846</b>	<b>84,93</b>	
27	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan/Kasus yang difasilitasi	7	7	100	100.000.000	52.084.000	52,08	
28	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	10	13	130	100.000.000	78.059.600	78,06	
29	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	28	28	100	100.000.000	82.450.000	82,45	
30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan	22	23	104,55	136.000.000	122.228.800	89,87	
		Jumlah Desa yang dimonev	22	22	100				
31	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial	21.950	15.589	71,02	5.087.273.428	4.004.475.022	78,72	
		Jumlah Kepala Desa Yang di latih	86	86	100				
		Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	193	193	100				
32	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi	15	15	100	100.000.000	44.060.400	44,06	
33	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pemberdayaan Bumdesa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	2	2	100	175.000.000	169.186.500	96,68	
34	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi Penerima Hibah	4	4	100	3.852.927.000	3.520.662.416	91,38	

		Jumlah Kepala Desa Yang terpilih	86	86	100				
35	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	13	13	100	90.000.000	74.767.000	83,07	
36	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Yang Disusun	1	1	100	80.000.000	62.806.000	78,51	
37	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Management Pemerintahan Desa	6	6	100	3.073.334.000	2.769.768.908	90,12	
38	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	15	15	100	80.000.000	79.351.600	99,19	
39	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik	220	220	100	323.012.453	307.641.000	95,24	
		Jumlah Anggota BPD yang Dibina dan dilatih	220	220	100				
40	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi	11	11	100	63.200.000	26.564.800	42,03	
41	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang difasilitasi	20	20	100	80.000.000	63.150.000	78,94	
42	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	100	80.000.000	27.934.000	34,92	
43	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangannya dan Jumlah dokumen IDM yang disusun	2	2	100	80.000.000	66.279.800	82,85	
		Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba	15	2	13,33				
	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Prosentase Posyandu Aktif</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>108,89</b>	<b>3.470.109.800</b>	<b>3.151.409.368</b>	<b>90,82</b>	
		<b>Prosentase Lembaga Masyarakat yang Aktif</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</b>	<b>210</b>	<b>4.666</b>	<b>2.221,90</b>	<b>3.470.109.800</b>	<b>3.151.409.368</b>	<b>90,82</b>	

44	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	1	100	100.000.000	90.901.036	90,9	
45	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	2	100	110.000.000	104.417.000	94,92	
46	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT, LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat)	30	30	100	543.478.400	474.086.500	87,23	
		Jumlah Kader Posyandu yang dibina	175	95	54,29				
		Jumlah Ketua RT yang terfasilitasi JKN dan JKK	38.748	37.824	97,62				
47	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Yang Difasilitasi Sarana dan Prasarananya	44	44	100	100.000.000	99.711.376	99,71	
48	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi	15	15	100	460.000.000	351.396.800	76,39	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pedesaan	25	25	100				
		Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan	25	25	100				
49	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	3	2	66,67	594.152.400	539.622.154	90,82	
		Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dikembangkan	2	2	100				
50	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Gelar Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3	3	100	100.000.000	91.162.400	91,16	

51	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Ketahanan Masyarakat	20	20	100	75.000.000	64.083.000	85,44	
52	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi TP PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga	3	3	100	1.387.479.000	1.336.029.102	96,29	
<b>J u m l a h</b>					<b>99,3</b>	<b>33.879.931.687</b>	<b>28.222.344.262</b>	<b>83,3</b>	

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Visi dan Misi DINAS PMD yang tertuang dalam RENSTRA DINAS PMD Tahun 2022-2026 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan berdasarkan Analisis kinerja pelayanan DINAS PMD sesuai dengan RENSTRA DINAS PMD tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1			Prosentase Pengentasan Desa Tertinggal	10	10	10	10	100		10	10	

2			Prosentase Peningkatan Status Desa Mandiri	10	10	10	10	22,45		10	10	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)			77	80	82	84	87,7		82	84	
4	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa			1,55	5,18	10,36	25,91	2		10,36	25,91	
5	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa			100	100	100	100	100		100	100	
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik			50	70	80	90	50		80	90	
7	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa			10	10	10	10	10		10	10	
8	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			100	100	100	100	100		100	100	
9	Persentase Posyandu Aktif			45,22	51,51	57,79	64,07	49		57,79	64,07	

**2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD****1. TINGKAT PELAYANAN DINAS PMD**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016, DINAS PMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Rendahnya keberdayaan masyarakat dan desa sebagai motor pembangunan;
- b. Dinamika Perkembangan Perekonomian Perdesaan yang masih belum optimal;
- c. Dinamika meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak Balita yang disebabkan belum optimalnya peran Posyandu dan Polindes di pedesaan.

Kemudian pada RENSTRA DINAS PMD Tahun 2021-2026 dilakukan review berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan ditetapkan dengan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan beberapa indikator utama yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
- 2) Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa
- 3) Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa
- 4) Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik
- 5) Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa
- 6) Prosentase Posyandu Aktif
- 7) Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

**Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Prosentase Pengentasan Desa Tertinggal		10	10	10	10	10	100					10				
			Prosentase Peningkatan Status Desa Mandiri		10	10	10	10	10	22,45					2,25				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)				77	80	82	84	85	87,7					113,90				
2	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa				1,55	5,18	10,36	25,91	38,86	2					129,03				
3	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa				100	100	100	100	100	100					100,00				

# RENCANA KERJA | 2024

4	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik				50	70	80	90	95	50					100,00				
5	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa				10	10	10	10	10	10					100,00				
6	Persentase Posyandu Aktif				45,22	51,51	57,79	64,07	70,35	49					108,36				
7	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif				100	100	100	100	100	100					100,00				

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	16.029.175.006	18.347.514.281	18.904.221.069	17.073.530.833	17.131.030.833	12.997.654.648					81,09					17.497.094.404	12.997.654.648
Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	429.900.000	747.052.000	470.000.000	370.000.000	370.000.000	265.576.400					61,78					477.390.400	265.576.400
Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	350.000.000	1.703.948.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	256.234.000					73,21					680.789.600	256.234.000
Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	13.600.746.881	26.196.035.828	5.411.945.536	9.456.085.828	4.456.085.828	11.551.469.846					84,93					11.824.179.980	11.551.469.846
Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa																	
Persentase Posyandu Aktif	3.470.109.800	14.369.751.400	1.623.478.400	1.205.000.000	1.205.000.000	3.151.409.368					90,82					4.374.667.920	3.151.409.368
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif																	

## 2. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

Secara struktur organisasi, saat ini DINAS PMD telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional (Bidang Perencana, Peneliti dan Arsiparis) belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang lainnya yaitu :

### **a. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :**

- 1) Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan, Keuangan Dan Aset Desa;
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Perkembangan Desa;
- 3) Seksi Kerjasama Desa;

### **b. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :**

- 1) Seksi Pelembagaan Dan Pengembangan Bumdesa;
- 2) Seksi Pengembangan Pasar Desa Dan Jaringan Pemasaran
- 3) Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan Dan Pengembangan Kewirausahaan;

### **c. Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam Dan TTG, membawahi :**

- 1) Seksi Sumber Daya Alam, Rahabilitasi Dan Konservasi Lingkungan;
- 2) Seksi Pengembangan Dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- 3) Seksi Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Prasarana;

**d. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Adat, membawahi :**

- 1) Seksi Kelembagaan, Adat Istiadat, Perencanaan Dan Pembangunan Partisipatif;
- 2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
- 3) Seksi Pengembangan Akses Informasi Dan Ketahanan Masyarakat;

Dimana keempat bidang tersebut telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan DINAS PMD ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan hal

tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Belum jelasnya strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DINAS PMD yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi ;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DINAS PMD baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparaturnya;
- 3) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
- 4) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi. Sedangkan akses informasi melalui jaringan internet masih belum dapat dimaksimalkan.

### **3. DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Visi Kutai Kartanegara adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**

Penjabaran makna dari MISI Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

**MISI**

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, DINAS PMD mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dimana DPMD memiliki peranan terhadap tercapainya Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Keterkaitan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Kutai Kartanegara itu terletak sebagaimana Visi dan Misi yang menjadi arah kebijakan Dinas PMD terletak pada :

- a. Misi 1 : Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.
- b. Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya serta, Misi
- c. Misi 3 : Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sehingga DINAS PMD memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

#### **4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Disamping beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, DINAS PMD memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal Visi dan Misi Bupati. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi, DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- a) Pentingnya peran DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku ;
- b) Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara

maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.

- d) Dinas PMD memiliki peranan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yaitu dengan tema : “ Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan “.

#### **5. FORMULASI ISU-ISU PENTING :**

- Pentingnya peran DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didukung oleh peraturan yang berlaku, oleh karena itu peningkatan porsi keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun dan memformulasikan ketentuan dan peraturan yang mengarah kepada peningkatan capaian hasil dan peningkatan percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan. Sehingga diharapkan peraturan (Perda/Perbup/SK Bupati) yang dihasilkan dapat terlaksana dan diharapkan menyentuh bagian terpenting dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di desa. Hal ini didasarkan pada peranan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa;
- Pemberian porsi lebih anggaran sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada pembangunan desa;
- Dinas PMD selaku leading sektor pembangunan di desa, sampai saat ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pembuatan regulasi yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan di desa.

- Pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini mengalami regenerasi. Peralihan Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh habis masa kerjanya (pensiun/purna tugas) maupun yang disebabkan mutasi karena karir pegawai ke kantor lainnya, fenomena ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan serta mengadvokasi masyarakat di desa.



			Daerah					Daerah			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	200.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>14.240.280.193</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>13.789.976.636</b>	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2782 Orang/Bulan	13.539.976.636	Penyesuaian Anggaran dari BPKAD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	250.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>5 Dokumen Laporan</b>	<b>48.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>5 Dokumen Laporan</b>	<b>48.000.000</b>	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	48.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	48.000.000	

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>847.975.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>847.975.000</b>	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 Paket	597.975.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	364 Paket	597.975.000	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>17 Persen</b>	<b>900.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>17 Persen</b>	<b>900.000.000</b>	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	250.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	50.000.000	

11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000	
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	186 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	186 Dokumen	100.000.000	
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	100.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	150.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>1.288.581.476</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>1.288.581.476</b>	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	202.740.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	202.740.000	

# RENCANA KERJA | 2024

16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	985.841.476	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	985.841.476	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>979.490.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20 Persen</b>	<b>979.490.000</b>	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	579.490.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	579.490.000	

20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	50.000.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	
	<b>PENATAAN DESA</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa</b>	<b>10,36 Persen</b>	<b>470.000.000</b>	<b>PENATAAN DESA</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa</b>	<b>10,36 Persen</b>	<b>570.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa</b>	<b>27 Desa</b>	<b>470.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa</b>	<b>27 Desa</b>	<b>570.000.000</b>	
22	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kec. Loa Janan, Desa Batuah Kec. Muara Muntai, Desa Jantur Selatan Kec. Muara Muntai, Desa Jantur	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa	3 Desa	120.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kec. Loa Janan, Desa Batuah Kec. Muara Muntai, Desa Jantur Selatan Kec. Muara Muntai, Desa Jantur	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa	3 Desa	120.000.000	
23	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Benua Puhun Kec. Sebulu, Desa Beloro	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	100.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Benua Puhun Kec. Sebulu, Desa Beloro	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	100.000.000	

# RENCANA KERJA | 2024

24	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kec. Anggana, Desa Sidomulyo Kec. Tenggarong Seberang, Desa Bukit Pariaman Kec. Samboja Barat, Desa Tani Bhakti Kec. Muara Kaman, Desa Bukit Jering Kec. Sebulu, Desa Manunggal Daya Kec. Kota Bangun Darat, Desa Kota Bangun III Kec. Kenohan, Desa Tuana Tuha Kec. Muara Muntai, Desa Muara Muntai Ilir Kec. Tabang, Desa Gunung Sari Kec. Muara Wis, Desa Lebak Mantan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	10 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kec. Anggana, Desa Sidomulyo Kec. Tenggarong Seberang, Desa Bukit Pariaman Kec. Samboja Barat, Desa Tani Bhakti Kec. Muara Kaman, Desa Bukit Jering Kec. Sebulu, Desa Manunggal Daya Kec. Kota Bangun Darat, Desa Kota Bangun III Kec. Kenohan, Desa Tuana Tuha Kec. Muara Muntai, Desa Muara Muntai Ilir Kec. Tabang, Desa Gunung Sari Kec. Muara Wis, Desa Lebak Mantan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	10 Desa	100.000.000	
25	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Lebaho Ulaq Kec. Loa Kulu, Desa Lung Anai Kec. Sebulu, Desa Lekaq Kidau	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	3 Desa	50.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Lebaho Ulaq Kec. Loa Kulu, Desa Lung Anai Kec. Sebulu, Desa Lekaq Kidau	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	3 Desa	50.000.000	
26	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman, Desa Kupang Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Liang Buaya, Desa Kupang Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	200.000.000	Penunjang Program Dedikasi Terang Kampongku dan Program Air Bersih Desa
	<b>PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>	<b>PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.050.000.000</b>	

# RENCANA KERJA | 2024

	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi</b>	<b>57 Desa</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi</b>	<b>57 Desa</b>	<b>1.050.000.000</b>	
27	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun I, Desa Wonosari, Desa Kedang Ipil, Desa Benua Baru, Desa Sedulang, Desa Sukabumi, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang Iilir, Desa Kota Bangun Iilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan, Desa Sangkuliman Kec. Marang Kayu, Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa Sambera Baru, Desa Bunga Putih Kec. Kembang Janggut, Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	9 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	500.000.000	Penunjang Program Dedikasi Kukar Bebaya dan penunjang Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan

		Beleh Modang, Desa Bukit Layang, Desa Muai, Desa Perdana Kec. Tabang, Desa Gunung Sari, Desa Long Lalang, Desa Muara Ritan, Desa Ritan Baru, Desa Buluksen									
28	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun I, Desa Wonosari, Desa Kedang Ipil, Desa Benua Baru, Desa Sedulang, Desa Sukabumi, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang Ilir, Desa Kota Bangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbangan, Desa Sangkuliman Kec. Marang Kayu, Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa Sambera Baru, Desa Bunga Putih Kec. Kembang Janggut, Desa Genting Tanah,	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	300.000.000	Penunjang Program Dedikasi Kukar Bebaya dan penunjang Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan

		Desa Loa Sakoh, Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long Beleh Modang, Desa Bukit Layang, Desa Muai, Desa Perdana Kec. Tabang, Desa Gunung Sari, Desa Long Lalang, Desa Muara Ritan, Desa Ritan Baru, Desa Buluksen								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Sebulu, Desa Manunggal Daya, Desa Mekar Jaya, Desa Sumber Sari, Kec. Muara Kaman, Desa Panca Jaya, Desa Sidomukti, Desa Cipari Makmur, Desa Bunga Jadi Kec. Tenggarong Seberang, Desa Embalut, Desa Bangun Rejo, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya, Desa Tanjung Batu, Desa Loa Lepu, Desa Kertabuana, Desa Buana Jaya, Desa Bukit Pariaman, Desa Sukamaju, Desa Separi Kec. Marang Kayu, Desa Semangko, Desa Sebuntal, Desa Santan Ulu, Desa Perangat Baru, Desa Makarti, Desa Perangat Selatan, Desa Bunga Putih, Desa Sambera Baru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Sebulu Kec. Tenggarong Seberang Kec. Marangkayu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	250.000.000	
	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<i>Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintah an Dalam Kategori Baik</i>	<b>80 Persen</b>	<b>5.411.945.536</b>	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<i>Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintah an Dalam Kategori Baik</i>	<b>80 Persen</b>	<b>22.714.719.536</b>	

			<i>Prosentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</i>	<i>10 Persen</i>				<i>Prosentase Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</i>	<i>10 Persen</i>		
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</b>	<b>193 Desa</b>	<b>5.411.945.536</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</b>	<b>193 Desa</b>	<b>22.714.719.536</b>	
30	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	100.000.000	
31	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	100.000.000	
32	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	120.000.000	
33	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	50 Dokumen	3.371.945.536	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	50 Dokumen	3.347.161.536	- Pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa - Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kades, Perangkat Desa dan BPD
34	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	86 Orang	100.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	86 Orang	100.000.000	

# RENCANA KERJA | 2024

35	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	14 Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	14 Dokumen	100.000.000	
36	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kec. Muara Muntai, Desa Muara Leka, Desa Kayu Batu, Desa Jantur Baru Kec. Loa Kulu, Desa Sungai Payang, Desa Loh Sumber Kec. Loa Janan, Desa Loa Janan Ulu, Desa Batuah Kec. Anggana, Desa Sepatin, Desa Kutai Lama Kec. Muara Badak, Desa Saliki Kec. Marangkayu, Desa Sambera Baru Kec. Sebulu, Desa Lekaq Kidau, Desa Sebulu Modern Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III Kec. Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang Kec. Muara Kaman, Desa Panca Jaya, Desa Puan Cepak, Desa Cipari Makmur Kec. Tabang, Desa Muara Ritan, Desa Buluksen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	11 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kec. Muara Muntai, Kec. Loa Kulu, Kec. Anggana, Kec. Muara Badak, Kec. Tenggarong, Kec. Sebulu, Kec. Kota Bangun, Kec. Kenohan, Kec. Kembang Janggut, Kec. Muara Kaman, Kec. Tabang, Kec. Samboja, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Marangkayu, Kec. Muara Wis, Kec. Loa Janan, Kec. Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	151 Dokumen	5.263.678.000	Penunjang Pogram Dedikasi Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan dan penunjang Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan

		Kec. Samboja, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Agung									
37	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23 Laporan	100.000.000	
38	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokumen	100.000.000	
39	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	6 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	6 Dokumen	12.463.880.000	Pembayaran Honorarium Pendamping Desa dan Kelurahan (Pendekar) Idaman
40	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	100.000.000	
41	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kec. Tenggarong	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	120.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kec. Tenggarong	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	120.000.000	

42	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tabang, Desa Sidomulyo Kec. Tabang, Desa Tabang Lama Kec. Tabang, Desa Kampung Baru Kec. Tabang, Desa Umaq Dian Kec. Tenggarong Seberang, Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang, Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang, Desa Embalut Kec. Muara Badak, Desa Tanjung Limau Kec. Kenohan, Desa Lamin Telihan Kec. Muara Wis, Desa Enggelam Kec. Muara Kaman, Desa Puan Cepak Kec. Marangkayu, Desa Santan Ulu Kec. Muara Badak, Desa Badak Mekar Kec. Marangkayu, Desa Prangat Baru	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tabang, Desa Sidomulyo Kec. Tabang, Desa Tabang Lama Kec. Tabang, Desa Kampung Baru Kec. Tabang, Desa Umaq Dian Kec. Tenggarong Seberang, Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang, Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang, Desa Embalut Kec. Muara Badak, Desa Tanjung Limau Kec. Kenohan, Desa Lamin Telihan Kec. Muara Wis, Desa Enggelam Kec. Muara Kaman, Desa Puan Cepak Kec. Marangkayu, Desa Santan Ulu Kec. Muara Badak, Desa Badak Mekar Kec. Marangkayu, Desa Prangat Baru	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	100.000.000	
43	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20 Laporan	100.000.000	
44	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	

			n oleh Desa					n oleh Desa			
45	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	400.000.000	
	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Prosentase Posyandu Aktif</b>	<b>57,79 Persen</b>	<b>1.623.478.400</b>	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Prosentase Posyandu Aktif</b>	<b>57,79 Persen</b>	<b>128.970.493.400</b>	
			<b>Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</b>	<b>100 Persen</b>				<b>Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</b>	<b>100 Persen</b>		
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</b>	<b>823 Lembaga</b>	<b>1.623.478.400</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KAB KUTAI KARTANEGARA</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</b>	<b>823 Lembaga</b>	<b>128.970.493.400</b>	
46	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara Kec. Tabang, Kec. Muara Kaman, Kec. Sebulu, Kec. Loa Kulu, Kec. Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara Kec. Tabang, Kec. Muara Kaman, Kec. Sebulu, Kec. Loa Kulu, Kec. Kota Bangun	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	100.000.000	

47	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Samarinda Kab. Kutai Kartanegara, Kec. Tenggarong, Kel. Timbau	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokumen	150.000.000	
48	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7630 Lembaga	543.478.400	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6147 Lembaga	13.475.493.400	Usulan Hasil Musrenbang dan hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah

49	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, 22 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 Unit	120.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	284 Unit	111.450.000.000	Usulan Hasil Musrenbang dan hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah
----	---	--	--	---------	-------------	---	------------------------	--	----------	-----------------	--

50	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kec. Anggana, Desa Sungai Meriam Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III Kec. Kenohan, Desa Tuana Tuha Kec. Muara Badak, Desa Tanah Datar, Desa Suka Damai, Desa Salo Cella Kec. Marangkayu, Desa Santan Tengah, Desa Sambera Baru Kec. Anggana, Desa Anggana Kec. Loa Kulu, Desa Loh Sumber, Desa Ponoragan Kec. Tenggarong Seberang, Desa Tanjung Batu, Desa Karang Tunggal, Desa Manunggal Jaya Kec. Sebulu, Desa Mekar Jaya, Desa Segihan Kec. Muara Kaman, Desa Kupang Baru, Desa Muara Siran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	170.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kec. Loa Kulu, Desa Loh Sumber, Ponoragan, Kec. Anggana, Desa Anggana, Sungai Meriam Kec. Muara Badak, Desa Tanah Datar, Suka Damai, Salo Cella Kec. Sebulu, Desa Segihan, Mekar Jaya Kec. Muara Kaman, Desa Muara Siran, Kupang Baru Kec. Tenggarong Seberang, Desa Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Tanjung Batu Kec. Marangkayu, Desa Santan Tengah, Sambera Baru Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III Kec. Muara Kaman, Desa Bunga Jadi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	500.000.000	Untuk mendukung program prioritas Perangkat Daerah sebagai penunjang Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan
51	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Kabupaten Paser Provinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	120.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Kabupaten Paser Provinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	120.000.000	

52	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tenggarong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	
53	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	
54	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	245.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa dan Kelurahan, Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	3.000.000.000	
<b>TOTAL</b>						<b>26.859.645.005</b>				<b>171.759.130.448</b>	

## 2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

2.5.1 Kegiatan ini kami peroleh ketika pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan yang memang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang melalui perwakilannya, seperti Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Pemuda. Dalam prosesnya, forum musrenbang menampung seluruh aspirasi yang masuk untuk ditelaah kembali dan diklasifikasi tentang kebutuhan prioritas dan leading sektor yang mengkoordinir aspirasi tersebut.

2.5.2 Hasil klasifikasi dan telaah kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan rencana pencapaian target program pemerintah daerah melalui RPJMD. Sehingga terdapat sinergisitas antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemangku jabatan sebagaimana tujuan dan arah pembangunan yang berdasarkan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten serta Renstra OPD terkait.

2.5.3 Diantara usulan yang telah diklasifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembidangan urusan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosialisasi bagi aparat desa, BPD, PKK	Bimbingan Teknis bagi Aparatur Desa, BPD, LPM (Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa Bangun Rejo (Kec. Tenggarong Seberang)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	86 Orang	Perlu Kejelasan jumlah Aparatur yang akan dibina
2	Sosialisasi bagi Aparat Desa, BPD, PKK	1. Untuk meningkatkan pengetahuan pengurus lembaga kemasyarakatan kel. Jawa 2. Sosialisasi Kader Posyandu 3. Pelatihan Kader Posyandu Balita dan Lansia (Pendampingan Kader dalam Pelayanan Posyandu) 4. Perlu pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Kader Posyandu	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Kel. Jawa (Kec. Sangasanga) 2. Kantor Lurah jl. Tennis Lapangan RT.13 Kelurahan Panji, Kab. Kutai Kartanegara) 3. Desa Bangun Rejo (Kec. Tenggarong Seberang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7630 Lembaga	1. Perlu kejelasan Lembaga yang akan dibina 2. Perlu ada kejelasan usulan 3. Kelengkapan data pendukung jumlah kader yang akan dibina

3	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Posyandu Remaja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya peralatan dan perlengkapan Posyandu</li> <li>2. Untuk meningkatkan minat anak datang ke Posyandu perlu sarana bermain</li> <li>3. Diperlukannya pengadaan perlengkapan Posyandu RT.004 Kuala Samboja</li> <li>4. Dibutuhkannya pengadaan bantuan Posyandu MP VII RT.006 Kuala Samboja</li> <li>5. Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana (Posyandu Nusa Indah)</li> <li>6. Kondisi alat pelayanan kesehatan yang kurang memadai</li> </ol>	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Jawa (Kec. Sangasanga)</li> <li>2. Kel. Samboja Kuala (Kec. Samboja)</li> <li>3. Kel. Handil Baru Darat (Kec. Samboja)</li> <li>4. Kel. Bukit Merdeka (Kec. Samboja Barat)</li> <li>5. RT.07 Desa Santan Tengah (Kec. Marangkayu)</li> <li>6. Posyandu Mawar Merah RT.10 Posyandu Melati Indah RT.05 Desa Santan Tengah (Kec. Marangkayu)</li> </ol>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 Unit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu list sarana dan prasarana yang dibutuhkan</li> <li>2. Perlu ada usulan proposal terkait sarana dan prasarana yang diperlukan</li> <li>3. Perlu RAB sarana dan prasarana yang dibutuhkan</li> </ol>
4	Sosialisasi bagi aparat desa, BPD, PKK	Perlunya peningkatan SDM dalam peran perempuan dalam senagai pelaku usaha kegiatan Bakti Sosial PKK Kel. Panji	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jl. Tenis Lapangan Rt.13 Kelurahan Panji Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	Lengkapi data pendukung jumlah orang yang akan mengikuti pelatihan

5	Sosialisasi bagi aparat desa, BPD, PKK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kemampuan masing-masing Pokja PKK</li> <li>2. Sosialisasi SMEP oleh PKK Kec kepada pengurus PKK Kelurahan agar administrasi dan pembukuan bisa lebih baik lagi</li> <li>3. Perlu adanya pengenalan Hatinya PKK kepada Anggota PKK Kelurahan</li> <li>4. Pelatihan/Sosialisasi PKK Desa guna meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa</li> </ol>	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Jawa (Kec. Sangasanga)</li> <li>2. PKK Kec Jl Ir Soekarno RT 35 Kel. Muara Jawa Ulu (Kec. Muara Jawa)</li> <li>3. Jl ir Soekarno RT 35 Kel. Muara Jawa Ulu (Kec. Muara Jawa)</li> <li>4. Desa Kelekat (Kec. Kembang Janggut)</li> </ol>	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ada kejelasan usulan</li> <li>2. Perlu kejelasan usulan terkait jumlah orang/lembaga yang akan dibina</li> <li>3. Perlu kejelasan usulan terkait konsep dan jumlah orang yang akan menjadi sasaran sosialisasi</li> <li>4. Lengkapi data dukung jumlah orang/lembaga yang akan dibina</li> </ol>
---	--	--	---	--	--	-----------	--

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa

gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2021-2026 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Mandiri** : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Maju** : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

**Adil** : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

**Makmur** : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangk-an modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa

Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan

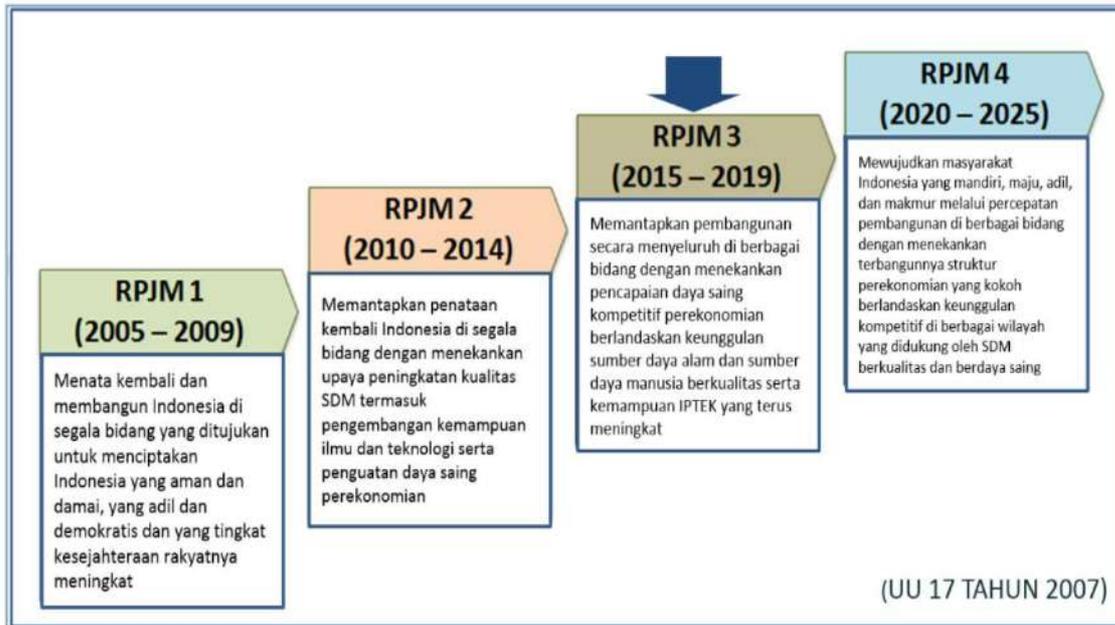
mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan

kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yaitu :



Berdasarkan telaahan Kebijakan Nasional melalui RPJMN dapat disinergikan dengan RPJMD, RENSTRA OPD serta Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan RPJMN 3 dari RPJPN, sehingga sangat diperlukan sinergisitas prioritas dan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah agar tujuan pembangunan Republik Indonesia yang telah dirancang secara sistematis melalui RPJPN maupun RPJMN dapat terlaksana secara maksimal.

**TABEL 3.1**  
**HUBUNGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Daerah</b>
1	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarusutamaan Gender</li> <li>2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang</li> <li>3. Peningkatan investasi sektor UMKM</li> <li>4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga</li> <li>5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global</li> <li>6. Pengembangan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru</li> <li>7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)</li> <li>8. Peningkatan ekspor produk olahan</li> <li>9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan</li> <li>10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian</li> <li>11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi</li> <li>12. Peningkatan infrastruktur pertanian</li> <li>13. Peningkatan produktivitas pertanian</li> <li>14. Perbaikan tata niaga produk pangan</li> <li>15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan</li> <li>16. Peningkatan rasio elektrifikasi</li> <li>17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi</li> <li>18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan maloy, kawasan industry lainnya dan pusat pertumbuhan.</li> </ol>

		19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
2	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.</li> <li>3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</li> <li>4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi</li> <li>5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan</li> <li>6. Penegakan hukum lingkungan</li> <li>7. Penurunan emisi gas rumah kaca</li> </ol> <p>Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah</p>
3	Politik	-
4	Hukum	-
5	Pertahanan dan Keamanan	-
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur</li> </ol>
7	Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan</li> <li>2. Peningkatan kesempatan belajar anak</li> <li>3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja</li> <li>5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi</li> </ol>
8	Kewilayahan	-

9	Kelautan	-

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Daya Saing Desa	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan, kewenangan, penamaan, kode desa, dan sarana prasarana desa
			2. Peningkatan kerjasama antar desa dan Kawasan Pedesaan berdasarkan potensi yang dimiliki	1. Meningkatkan Kerjasama Desa berbasis Kawasan Pertanian dalam arti luas 2. Mengidentifikasi kawasan pedesaan berbasis potensi komoditas unggulan desa
			3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Memperkuat kapasitas fiskal desa dengan mengoptimalkan specific grant (bantuan keuangan khusus) kepada desa 3. Membentuk gugus tugas pendamping desa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan/tehnis 4. Mendorong BUMDesa untuk mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat (Pertanian, air bersih, dan listrik desa dll)
			4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan desa/Kelurahan	1. Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Optimalisasi Peran RT melalui pengalokasian 50 juta rupiah per RT 3. Mendorong Ekonomi Masyarakat dengan menggali potensi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Mengembangkan semangat Gotong Royong dan Tetap Menjaga Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

TABEL 3.2

SASARAN YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase tingkat perkembangan lembaga kemasyarakatan Prosentase tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa Prosentase status desa berkembang menjadi desa maju di Kukar

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****4.1 RENCANA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN**

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Dalam tahun anggaran 2024 Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja. Berikut adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024 :

**Tabel T-C.33.**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			26.859.645.005				25.080.071.969
2	13	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)</i>	82 Nilai	18.904.221.069		84 Nilai	17.843.126.433
2	13	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	449.894.400	100 Persen	450.000.000

2	13	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	7 Dokumen	249.894.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7 Dokumen	250.000.000
2	13	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 Laporan	200.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>14.240.280.193</b>		<b>12 Laporan</b>	<b>14.238.185.961</b>
2	13	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2782 Orang/Bulan	13.990.280.193
2	13	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Laporan	247.905.768
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>		<b>5 Dokumen Laporan</b>	<b>48.000.000</b>		<b>1 Dokumen Laporan</b>	<b>48.000.000</b>
2	13	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	5 Laporan	48.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	48.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>20 Persen</b>	<b>847.975.000</b>		<b>20 Persen</b>	<b>250.000.000</b>

2	13	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	364 Paket	597.975.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0	-
2	13	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Jakarta Yogyakarta Malang	50 Orang	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 Orang	250.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>17 Persen</b>	<b>900.000.000</b>			<b>23 Persen</b>	<b>674.000.000</b>
2	13	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	8 Paket	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8 Paket	250.000.000
2	13	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Paket	24.000.000
2	13	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Dokumen	50.000.000
2	13	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	350.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	150.000.000
2	13	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	186 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		186 Dokumen	100.000.000

2	13	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	50 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 Dokumen	100.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>
2	13	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	30 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30 Unit	150.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>20 Persen</b>	<b>1.288.581.476</b>			<b>23 Persen</b>	<b>1.203.450.472</b>
2	13	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2 Laporan	202.740.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	200.000.000
2	13	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Laporan	100.000.000
2	13	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	12 Laporan	985.841.476	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	903.450.472
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>20 Persen</b>	<b>979.490.000</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>		<b>23 Persen</b>	<b>829.490.000</b>

2	13	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	5 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Unit	100.000.000
2	13	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3 Unit	579.490.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Unit	579.490.000
2	13	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	20 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Unit	50.000.000
2	13	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1 Unit	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	100.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa</b>		<b>10,36 Persen</b>	<b>470.000.000</b>			<b>25,91 Persen</b>	<b>470.000.000</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa</b>		<b>27 Desa</b>	<b>470.000.000</b>			<b>27 Desa</b>	<b>470.000.000</b>
2	13	2	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitas Pembentukan Desa	Kec. Loa Janan, Desa Batuah Kec. Muara Muntai, Desa Jantur Selatan Kec. Muara Muntai, Desa Jantur	3 Desa	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Desa	120.000.000

2	13	2	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kec. Muara Kaman, Desa Benua PuhunKec. Sebulu, Desa Beloro	2 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Desa	100.000.000
2	13	2	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kec. Anggana, Desa Sidomulyo Kec. Tenggarong Seberang, Desa Bukit Pariaman Kec. Samboja Barat, Desa Tani Bhakti Kec. Muara Kaman, Desa Bukit Jering Kec. Sebulu, Desa Manunggal Daya Kec. Kota Bangun Darat, Desa Kota Bangun III Kec. Kenohan, Desa Tuana Tuha Kec. Muara Muntai, Desa Muara Muntai Ilir Kec. Tabang, Desa Gunung Sari Kec. Muara Wis, Desa Lebak Mantan	10 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Desa	100.000.000
2	13	2	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Lebaho Ulaq Kec. Loa Kulu, Desa Lung Anai Kec. Sebulu, Desa Lekaq Kidau	3 Desa	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Desa	50.000.000

2	13	2	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kec. Muara Kaman, Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman, Desa Kupang Baru	2 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Unit	100.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa</b>		<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi</b>		<b>57 Desa</b>	<b>450.000.000</b>			<b>57 Desa</b>	<b>450.000.000</b>
2	13	3	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun I, Desa Wonosari, Desa Kedang Ipil, Desa Benua Baru, Desa Sedulang, Desa Sukabumi, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang Ilir, Desa Kota Bangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbangan, Desa Sangkuliman Kec. Marang Kayu, Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa	9 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		9 Dokumen	100.000.000

							Sambera Baru, Desa Bunga PutihKec. Kembang Janggut, Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long Beleh Modang, Desa Bukit Layang, Desa Muai, Desa PerdanaKec. Tabang, Desa Gunung Sari, Desa Long Lalang, Desa Muara Ritan, Desa Ritan Baru, Desa Buluksen						
2	13	3	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun I, Desa Wonosari, Desa Kedang Ipil, Desa Benua Baru, Desa Sedulang, Desa Sukabumi, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang Ilir, Desa Kota Bangun Ilir,	2 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	100.000.000

						Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan, Desa SangkulimanKec. Marang Kayu, Desa Perangat Baru, Desa Perangat Selatan, Desa Makarti, Desa Sambera Baru, Desa Bunga PutihKec. Kembang Janggut, Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long Beleh Modang, Desa Bukit Layang, Desa Muai, Desa PerdanaKec. Tabang, Desa Gunung Sari, Desa Long Lalang, Desa Muara Ritan, Desa Ritan Baru, Desa Buluksen					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	13	3	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Sebulu, Desa Manunggal Daya, Desa Mekar Jaya, Desa Sumber Sari, Kec. Muara Kaman, Desa Panca Jaya, Desa Sidomukti, Desa Cipari Makmur, Desa Bunga Jadi Kec. Tenggarong Seberang, Desa Embalut, Desa Bangun Rejo, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya, Desa Tanjung Batu, Desa Loa Lepu, Desa Kertabuana, Desa Buana Jaya, Desa Bukit Pariaman, Desa Sukamaju, Desa SepariKec. Marang Kayu, Desa Semangko, Desa Sebuntal, Desa Santan Ulu, Desa Perangat Baru, Desa Makarti, Desa Perangat Selatan, Desa Bunga Putih, Desa Sambera Baru	3 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	250.000.000
---	----	---	------	----	--	---	---	-----------	-------------	--------------------------------------	--	-----------	-------------

2	13	4			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa</b>		<b>80 Persen</b>	<b>5.411.945.536</b>			<b>90 Persen</b>	<b>5.111.945.536</b>
								<b>10 Persen</b>				<b>10 Persen</b>	
2	13	4	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</b>		<b>193 Desa</b>	<b>5.411.945.536</b>			<b>3025 Desa</b>	<b>5.111.945.536</b>
2	13	4	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	8 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8 Dokumen	100.000.000
2	13	4	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	8 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8 Dokumen	100.000.000
2	13	4	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	1 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	120.000.000
2	13	4	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	50 Dokumen	3.371.945.536	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		50 Dokumen	3.371.945.536
2	13	4	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		86 Orang	100.000.000
2	13	4	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14 Dokumen	100.000.000
2	13	4	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan	Kec. Muara Muntai, Desa Muara Leka,	11 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum -		11 Dokumen	100.000.000

					Kerja sama antar Desa	BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Desa Kayu Batu, Desa Jantur Baru, Kec. Loa Kulu, Desa Sungai Payang, Desa Loh Sumber, Kec. Loa Janan, Desa Loa Janan Ulu, Desa Batuah, Kec. Anggana, Desa Sepatin, Desa Kutai Lama, Kec. Muara Badak, Desa Saliki, Desa Sambera Baru, Kec. Sebulu, Desa Lekaq Kidau, Desa Sebulu Modern, Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Kec. Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Kec. Muara Kaman, Desa Panca Jaya, Desa Puan Cepak, Desa Cipari Makmur, Kec. Tabang, Desa Muara Ritan, Desa Buluksen, Kec. Samboja, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Agung				Dana Bagi Hasil			
--	--	--	--	--	-----------------------	---	---	--	--	--	-----------------	--	--	--

2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	23 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		70 Persen10 Persen	100.000.000
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	18 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18 Dokumen	100.000.000
2	13	4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6 Dokumen	300.000.000
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		54 Dokumen	100.000.000
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kec. Tenggarong	30 Orang	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30 Orang	120.000.000

2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tabang, Desa SidomulyoKec. Tabang, Desa Tabang LamaKec. Tabang, Desa Kampung BaruKec. Tabang, Desa Umaq DianKec. Tenggarong Seberang, Desa SepariKec. Tenggarong Seberang, Desa Bukit PariamanKec. Tenggarong Seberang, Desa EmbalutKec. Muara Badak, Desa Tanjung LimauKec. Kenohan, Desa Lamin TelihanKec. Muara Wis, Desa EnggelamKec. Muara Kaman, Desa Puan CepakKec. Marangkayu, Desa Santan UluKec. Muara Badak, Desa Badak MekarKec. Marangkayu, Desa Prangat Baru	15 Desa	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		15 Desa	100.000.000
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa	20 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20 Laporan	100.000.000

2	13	4	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tumbang	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100.000.000
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	18 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		18 Dokumen	100.000.000
2	13	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif/Persentase Posyandu Aktif</b>		<b>100 Persen57,79 Persen</b>	<b>1.623.478.400</b>			<b>100 Persen64,07 Persen</b>	<b>1.205.000.000</b>
2	13	5	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif</b>		<b>823 Lembaga</b>	<b>1.623.478.400</b>				<b>1.205.000.000</b>
2	13	5	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara Kec. Tabang, Kec. Muara Kaman, Kec. Sebulu, Kec. Loa Kulu, Kec. Kota Bangun	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100.000.000

2	13	5	2.01	02	Fasilitasi Penataan, PEMBERDAYAAN dan PENDAYAGUNAAN Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, PEMBERDAYAAN dan PENDAYAGUNAAN Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	18 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	18 Dokumen	150.000.000
2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7630 Lembaga	543.478.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	7630 Lembaga	125.000.000
2	13	5	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kutai Kartanegara, 22 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	30 Unit	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	60 Unit	120.000.000

2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kec. Anggana, Desa Sungai Meriam Kec. Kota Bangun, Desa Kota Bangun III Kec. Kenohan, Desa Tuana Tuha Kec. Muara Badak, Desa Tanah Datar, Desa Suka Damai, Desa Salo Cella Kec. Marangkayu, Desa Santan Tengah, Desa Sambera Baru Kec. Anggana, Desa Anggana Kec. Loa Kulu, Desa Loh Sumber, Desa Ponoragan Kec. Tenggarong Seberang, Desa Tanjung Batu, Desa Karang Tunggal, Desa Manunggal Jaya Kec. Sebulu, Desa Mekar Jaya, Desa Segihan Kec. Muara Kaman, Desa Kupang Baru, Desa Muara Siran	3 Dokumen	170.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	170.000.000
2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan Kabupaten Paser	3 Laporan	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Laporan	120.000.000

							Provinsi Jawa Timur						
2	13	5	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	100.000.000
2	13	5	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Tenggarong	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	75.000.000
2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Desa dan Kelurahan	8 Dokumen	245.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		8 Dokumen	245.000.000

**BAB V****P E N U T U P**

Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2024 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

**a. CATATAN PENTING**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good, clean and open governance* di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja (Renja) ini kami buat dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah kami susun melalui Renja ini. Selain beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, kami juga beberapa pointer catatan penting yaitu :

1. Dalam proses penyusunan Renja OPD diharapkan dapat mengakomodir aspirasi, terutama aspirasi masyarakat grass root. Dalam hal ini harus ada sinkronisasi antara waktu pelaksanaan Musrenbangdes dengan Musrenbang Kecamatan.
3. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi similtas antar instansi guna menghasilkan ide-ide pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tersusun.
4. Menciptakan good and clean goverment dengan melakukan langkah-langkah penciptan legalitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dinaungi oleh payung atau produk hukum.

**b. KAIDAH PELAKSANAAN**

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturn Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Rencana Kerja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seluruh aparaturn Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

**c. TINDAK LANJUT**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini, ada beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengawal realisasinya. Diantaranya adalah :

1. Menjaga konsistensi Aparatur dalam menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah maupun Program Prioritas dan program Dedikasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur serta sumber daya yang ada pada OPD;
3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah yang lain dalam pelaksanaan Program Kegiatan Lintas Perangkat Daerah guna menghindari friksi-friksi dan miss comunication dalam lingkungan OPD serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta sinkronisasi sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang sinergis;
4. Melakukan pressure (tekanan) terhadap Pemerintah Desa khususnya dalam memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dan BUMDes dan BUMDesma dalam upaya pengembangan Ekonomi Unggulan Desa, untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja serta menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik maupun inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga hasilnya mampu mengarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.

Rencana Kerja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan penelaahan dan penyelarasan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Maret 2023



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. Wolter Monginsidi Komplek  
Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara  
Gedung E Lantai 1 Telp. 0541-661832,  
Fax. 6669032 Kode Pos. 75511  
Tenggarong